

# Retribusi IMTA Anjlok

**BATAM KOTA (BP)** - Pendapatan retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) terus menurun. Pemicunya ternyata akibat banyaknya tenaga kerja asing (TKA) yang hanya menggunakan visa kunjungan wisata untuk bekerja.



F. CECEP MULYANA/BATAM POS  
**Aman**

"Trik mereka, setiap masa kunjungan mau habis, tinggal menyeberang ke Singapura atau Malaysia. Habis itu masuk lagi ke Batam dan dapat jatah waktu tinggal lumayan lama, sekitar satu bulanan. Begitu seterusnya," ujar anggota DPRD Batam Aman, Selasa (9/4).

Dengan cara ini, TKA atau perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing tidak perlu mengeluarkan biaya untuk IMTA. Namun efeknya, retribusi IMTA semakin menurun.

Tahun 2017, target retribusi IMTA sebesar Rp 34 miliar, namun, realisasinya di akhir tahun hanya Rp 31 miliar. "Ini data yang disampaikan BP2RD (Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah)," ujarnya.

Pamong Praja (Satpol PP) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam ditangkap Satuan Reskrim Polresta

kunci T di lebih 20 lokasi. Informasi yang dihimpun di lapangan, penangkapan Wan bermula dari laporan pemilik



F. CECEP MULYANA/BATAM POS

**DISPERINDAG Kota Batam, BPOM Kepri, Kepolisian mengecek produk ikan makarel saat razia supermarket di Batam Center, Kamis (29/3) lalu. Hingga kemarin, sudah 47 ribu kaleng ikan kemasan ditarik dari pasaran.**

## Sudah 47 Ribukaleng Ikan Makarel Ditarik

**BATAM KOTA (BP)** - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam mengklaim sudah 47 ribu kaleng ikan dalam kemasan

kaleng dari 27 merek ditarik dari pasaran di Batam karena mengandung cacing.

utang di bank. Makanya (gaji sebagai anggota Satpol

na dan rekamya, anggota nakan mobil. Apes, di perjalanan ia diadang gerombo-

minik pengemudi, kita amankan dulu sebagai barang bukti," tutup Yanto.\*\*\*

## Retribusi IMTA Anjlok

Sambungan dari hal 9

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu meminta pemerintah daerah perlu melakukan pengawasan ketat terhadap pekerja asing yang tidak menggunakan visa kerja dengan melakukan inventarisasi jumlah pekerja asing yang ada di sejumlah perusahaan di Batam.

Selain retribusi, ia juga mempertanyakan data tenaga kerja di Batam. Sebab dari data Kementerian Tenaga Kerja, terdapat sekitar 5.200 pekerja asing. Tapi dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) hanya tercatat 2.511 orang sesuai data pekerja asing yang memperpanjang IMTA.

"Ada perbedaan data. Artinya dengan jumlah sebesar ini, realisasi retribusi IMTA

hanya Rp 31 miliar. Potensi kehilangan retribusi IMTA kita juga sebesar itu," ungkapnya.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Batam Ricky Indrakari menyoroti penggunaan dana IMTA. Menurutnya, tiga tahun pengelolaan dana IMTA terindikasi melanggar Perda IMTA. Sebab, pada pasal 24 bab 4 mengatur 70 persen dana IMTA wajib diperuntukkan untuk pelatihan produktivitas tenaga kerja.

Sementara realisasinya tidak sampai angka 50 persen.

Ia mencontohkan, tahun 2017, dari Rp 34 miliar dana IMTA, dialokasikan Rp 15 miliar untuk pelatihan tenaga kerja. Padahal, bila mengacu perda, seharusnya di angka Rp 23,8 miliar. "Jelas pelanggaran perda. Ini sudah terjadi

di tiga tahun terakhir," sebut Ricky.

Sebelumnya, Kepala Dinas Penanaman Modal-Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Batam Gustian Riau mengatakan target IMTA ini memang tidak jauh berbeda dari tahun lalu. Kalau pun tidak tercapai, tidak akan jauh dari target.

"Kalau IMTA tahun ini kita perkirakan Rp 34 miliar. Kita berharap akan tercapai. Mudah-mudahan tidak ada tenaga kerja asing yang datang ke Batam tanpa prosedur atau tanpa izin," ucapnya.

Terkait penggunaan dana IMTA ini, kata Gustian, memang sebagian besar diberikan untuk Disnaker. Utamanya adalah menciptakan warga yang profesional dan siap kerja.(rng)

## Sudah 47 Ribu Kaleng Ikan Makarel Ditarik

Sambungan dari hal 9

Kabid Perdagangan Disperindag Kota Batam Adisthy mengatakan, 27 merek ikan kemasan itu terdiri dari 16 produk impor dan 11 merek produk dalam negeri. "Iya, catatan kita sudah ada 47 ribu dari 27 merek yang ditarik," tegas Adisthy lagi, Selasa (10/4).

Sejauh ini, sambungunya,

pihaknya belum bisa memas-tikan jika 27 produk ikan kaleng sudah ditarik secara keseluruhan. Namun begitu, Disperindag mengaku telah memberikan imbauan dan pembinaan kepada para pedagang untuk tidak lagi memperjualbelikan produk tersebut.

"Dibidang sudah *gak* ada di pasar *gak* berani juga kita. Yang jelas kita selalu koordi-

nasi dengan dinas terkait," paparnya.

Tidak hanya itu, kata Adisthy, pihaknya juga terus melakukan pengawasan di lapangan untuk memantau agar ke-27 produk ikan kemasan kaleng tersebut benar-benar ditarik dari pasaran. "Kita terus awasi. Di ritel modern bisa kami pastikan sudah tidak ada lagi yang menjual produk tersebut,"

lanjut dia.

Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kepri memastikan 27 merek produk ikan kemasan kaleng mengandung cacang parasit. Karenanya, BPOM Kepri meminta importir dan distributor segera menarik dan memusnahkan seluruh produk tersebut dalam teng-gat waktu satu bulan sejak Kamis (29/3) lalu.(rng)

**BADAN USAHA JASA PENGAMAN**

**PT. SERGAP 17**  
SECURITY SERVICES

IZIN BUJIP DARI MAJES POLRI NO. POL : 81/2504/18/2016  
IZIN M9 DARI MAJES POLRI NO. POL : 81/2505/18/2016  
IZIN DIKLAT DARI MAJES POLRI NO. POL : 81/9803/XI/2016

**TELAH DIBUKA PENDIDIKAN**  
**SATPAM**

**PENDAFTARAN**  
**29 MARET 2018 S/D**  
**07 APRIL 2018**



# Master Plan Drainase Tak Jelas

**BATAM KOTA (BP)** - Minimnya ketersediaan lahan untuk saluran air oleh pengembang disebut-sebut jadi salah satu pemicu terjadinya banjir di sejumlah wilayah Batam. Ke depan perlu ada kebijakan yang komprehensif untuk menyelesaikan persoalan ini,

baik dari pemerintah maupun pengembang.

Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad berharap setiap pembangunan area permukiman seyogyanya harus mempertimbangkan drainasenya. Diakuinya, minimnya ruang khusus sal-

uran air kerap ditemui di lokasi-lokasi pembangunan permukiman.

"Sering kami turun dan menemukan (drainase) satu perumahan nempel dengan perumahan lain. Ada juga paritnya tidak ada atau kecil. Ini yang membuat

banjir," ungkapnya. Untuk itu, ia meminta pengembang ikut membantu pemerintah mengatasi persoalan banjir ini.

Lalu bagaimana dengan lokasi yang sudah terlanjur memiliki saluran kecil? Amsakar mengaku Pemko Batam akan membuat kebijakan yang dapat meminimalisir persoalan tersebut.

"Biasanya kami atau kepala dinas (Bina Marga) akan telepon langsung pengembang. Jika masih ada ruang kami akan turunkan alat untuk menormalisasi parit-parit itu," ucapnya.

Ke depan, kata dia, antarpengembang di Batam dapat meningkatkan sinergi agar masyarakat sebagai konsumen dari rumah-rumah yang dibangun tidak dirugikan. "Mudah-mudahan dapat bersinergi dengan baik," harapnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Khusus Batam Achyar Arfan

mengatakan masalah ini sudah beberapa kali didiskusikan Pemko Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam. REI sendiri pun sedang mempersiapkan pertemuan internal untuk membicarakan masalah ini.

Menurut dia, persoalan utamanya Batam tidak memiliki rencana induk drainase yang dapat dijadikan rujukan saat pengembang membangun perumahan. "Tak punya *master plan* yang *integrate* antara satu *project* dengan *project* yang lain," sebut Achyar.

Ia mencontohkan seperti yang terjadi di Marina Sekupang. Proyek pembangunan kawasan permukiman tidak disertai pedoman induk. Menurutnya, sejatinya aturan induk ini dipersiapkan oleh pemerintah. Aturan ini akan jadi rujukan pengembang untuk menyiapkan lahan untuk drainase maupun jalan yang terintegrasi.

"Hanya gambar-gambar PL

saja, enggak pernah ada pedoman ini untuk jalan maupun drainase," imbuhnya.

Di lokasi tersebut sejatinya Pemko Batam memperjelas alur drainase induknya, sehingga bisa jadi pegangan pengembang. Apalagi tipikal tanah Marina datar. "Ini tentu jadi pelajaran ke depan," ucapnya.

Ia tak menampik ketiadaan *master plan* (pedoman induk) tak membuat sejumlah pengembang membuat saluran hingga ke saluran yang besar. Namun ia berharap perlu ada aturan tersebut sehingga lebih terarah.

"Kalau ada *master plan* induk drainase, kita jadi tahu dimana drainase besarnya saat buka *project*. Mestinya ada di RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Tapi tak ada RTRW yang nantinya dirinci dalam RDTR (Rancangan Detail Tata Ruang)," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Cipta Karya Kota Batam Suhar menyampaikan RTRW



K. CECIL MILYANA/WP

Amsakar Achmad

Batam diproyeksikan akan selesai tahun ini. Jika RTRW sudah disahkan, pihaknya mulai mempersiapkan RDTR yang mengatur secara terperinci tentang tata ruang wilayah berikut zonasi wilayah.

"Mudah-mudahan RDTR selesai jadi Perda dalam dua tahun, walau di RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) kami targetnya tahun 2021," kata Suhar, belum lama ini. (adi)

## Bobol Mobil di 20 Lokasi

Sambungan dari hal 9

adalah mobil yang diparkir di pusat perbelanjaan, kawasan pelabuhan, bandara, hingga di parkir restoran.

Kapolsek Batam Kota Kompol Firdaus membenarkan penangkapan oknum anggota Satpol PP yang mengaku berstatus sebagai aparat sipil negara (ASN) alias pegawai negeri sipil (PNS) tersebut. Sejauh ini, pihaknya masih mendalami keterangan dari kedua pelaku spesialis pembobolan mobil itu.



lan remaja yang hendak memalaknya. "Anak-anak itu memberhentikan mobil dan meminta rokok kepada saya. Saya kasih rokok dan mereka pergi," ujarnya saat melapor ke Mapolsek Batuaji, Rabu (10/4).

Namun, berselang beberapa meter mereka kembali memberhentikan mobilnya. Ia dipaksa turun dari dalam mobil. Karena menolak, lantas remaja-remaja itu kesal lalu memukul kaca mobil bagian belakang dan samping kiri menggunakan kayu broti. "Kaca belakang dan samping belakang" sebutnya

# PERDAGANGAN



F. CECEP MULYANA/BATAM POS

**TONI**, penjual daging memotong daging sapi beku yang akan dijualnya, beberapa waktu lalu. Penjualan daging sapi beku akan diawasi agar tak melebihi HET.

## Harga Daging Beku Tak Boleh di Atas HET

**LUBUKBAJA (BP)** - Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam akan mengupayakan harga daging sapi beku tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Khususnya saat memasuki bulan Ramadan pada pertengahan Mei mendatang.

Kendati demikian, Kepala Disperindag Kota Batam Zarefriadi mengaku belum mengetahui harga daging sapi beku kembali naik di pasaran Batam.

"Saya belum dapat laporan terbaru. Setahu saya, setelah naik beberapa waktu lalu sudah turun dan harganya sesuai HET," ujar Zarefriadi saat menghadiri acara di Nagoya Hills Hotel, Lubukbaja, Selasa (10/4).

Dikatakannya, tim dari Diperindag bagian Pasar akan mengecek kebenaran informasi harga daging sapi beku tersebut. Jika memang naik, pihaknya akan meminta distributor daging menjelaskan alasan kenaikan daging sapi beku tersebut.

"Nah, di situ bisa jelas apa alasan kenaikan," imbuh Zaref.

Menurut dia, harga daging sapi beku sebenarnya tak boleh berada di atas HET. Sebab, pemerintah pusat sudah mengatur harganya. Apalagi, ia mendengar pemerintah pusat akan kembali meminta tambahan impor daging sapi beku.

"Harusnya tak boleh di atas HET. Apalagi mau Lebaran ini. Pokoknya akan kami usahakan jika daging sapi tetap sesuai HET," pungkas Zaref. (she)

# Pengawasan Warnet Masih Longgar

## Masih Banyak Dijumpai Anak Sekolah

**SAGULUNG (BP)** - Pengawasan terhadap warung internet (warnet) di Batam masih sangat lemah. Di sejumlah warnet di Kecamatan Sagulung misalnya, masih dijumpai anak-anak dan remaja berseragam sekolah keluar masuk warnet.

Seperti terlihat di salah satu warnet yang tak jauh dari kantor Kecamatan Sagulung. Pantauan *Batam Pos*, pelajar tersebut terlihat nongkrong di depan warnet. Bahkan salah satu dari mereka ada yang tengah merokok.

Kasi Trantib Kecamatan Sagulung Jamil mengatakan, selama ini pihaknya sudah melakukan pengawasan terhadap warnet yang membandel tersebut. Yakni, berupa sosialisasi dan imbauan agar pemilik warnet membatasi

pengunjungnya. Terlebih pelajar yang berniat main *game online*.

"Anak-anak atau pelajar dilarang, kami selalu imbau itu," ujar Jamil, Selasa (10/4).

Kendati demikian, ia mengaku masih banyak pemilik warnet yang menyalahi aturan. Tak ayal, banyak anak-anak yang keluar masuk warnet tanpa pengawasan. "Memang pengawasan belum maksimal," katanya.

Sejauh ini beberapa warnet sudah pernah dilayangkan surat peringatan.

Terkait jumlah warnet di wilayahnya, Jamil menyebutkan ada sekitar 200 warnet yang tersebar di enam kelurahan. Ratusan warnet tersebut sebagian besar belum memiliki izin, sehingga kedepannya pihaknya akan

memberikan perhatian khusus untuk mengawasinya.

"Sebenarnya minggu kemarin sudah mau razia, tapi bocor. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa kembali turun ke lapangan," jelasnya.

Keberadaan warnet yang tak terkontrol itu juga kerap dijadikan tempat bagi anak-anak untuk membentuk kelompok kriminal seperti geng motor kriminal dan lain sebagainya. Itu karena warnet memberikan keleluasaan kepada anak untuk berkumpul dan bermain hingga larut malam.

Anak-anak yang sudah kecanduan bermain di warnet akan rela melakukan apa saja demi mendapatkan uang untuk sewa warnet itu.

"Imbauan untuk orang tua untuk selalu mengawasi pergaulan anak-anak mereka," tutup Jamil. (une)

## Prioritas Sektor Pariwisata

**BATAM (BP)** - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam akan menggelar dialog ekonomi pada rapat pimpinan Kadin Batam 2018-2019 di Best Western Premiere Panbil, Kamis (12/4). Ada lima rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah. Salah satunya menyangkut pariwisata di Batam.

"Sektor pariwisata kita prioritaskan karena melibatkan banyak pihak," kata Ketua Kadin Kota Batam Jadi Rajagukguk, Selasa (10/4).

Diakuinya, pada rapim tahun lalu, Kadin Batam juga merekomendasikan sektor pariwisata. Hal ini tidak lepas dari lesunya sektor industri yang lain. Kadin berkeyakinan, sembari menunggu pulihnya sektor manufaktur dan industri lain, sektor pariwisata mesti mendapat perhatian pemerintah.

"Saat ini pariwisata bukan saja urusan pemerintah tetapi juga industri pariwisata itu sendiri," tuturnya.

Empat rekomendasi lainnya yang dipaparkan menyangkut ketenagakerjaan, kepastian hukum, perdagangan serta pemberdayaan UKM. Dialog ekonomi ini nantinya mengambil tema optimalisasi peran Kadin Batam sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Batam.

"Rekomendasi ini akan kita sampaikan kepada Pemko, BP Batam dan DPRD Batam," lanjut Raja.

Sebagai mitra pemerintah daerah dan diatur oleh undang-undang, hal ini dianggap penting untuk ditindaklanjuti. Ketua Panitia Rapim Kadin Batam, Suyono menambahkan, ada beberapa narasumber dalam kegiatan ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Darmin Nasution, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro, Wali Kota Batam, Ketua BP Batam Ketua DPRD Batam dan pengusaha. "Ini sesuai yang dijadwalkan. Mudah-mudahan bisa terselenggara dengan baik," kata Suyono. (rng)

# Disdik Harus Cari Solusi

## Jika PPDB Banyak Siswa Tak Tertampung

**SEKUPANG (BP)** - Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyoroti sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Kota Batam Juni mendatang. Ia khawatir persoalan daya tampung yang terbatas kem-

bali mencuat.

"Kalau sistem penerimaan (PPDB) terserah saja. Mau zonasi atau prestasi diterapkan terserah aturan yang ada. Yang jadi masalah itu siswa tidak tertampung," kata Amsakar, Selasa (10/4).

Mengingat semakin dekatnya waktu PPDB, ia meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam untuk segera menyelesaikan regulasi penerimaan siswa baru nanti. Mulai dari cara penerimaan hingga kuota yang bisa dit-

ampung di sekolah negeri.

"Ini juga perlu diperhatikan, karena setiap PPDB luapan pendafatar selalu terjadi," sebutnya.

Amsakar menuturkan, saat ini Disdik tengah melakukan finalisasi prosedur pendaftaran PPDB. Ia berharap seluruh instansi terkait bersama-sama membahas agar mendapatkan solusi terbaik saat PPDB.

Ia tak memungkiri beberapa

tahun terakhir siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri selalu menjadi masalah. Akhirnya, sekolah terpaksa menampung dengan konsekwensi jadwal belajar dibagi pagi dan siang atau dua shift. "Ini tak terhindarkan karena minat ke (sekolah) negeri sangat tinggi," sebutnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMAN 1 Batam M. Chaidir mengatakan hingga saat ini

masih menunggu petunjuk teknis (juknis) PPDB dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepri.

"Tahun lalu kami sudah sistem zonasi, tahun ini belum tahu apakah sama atau ada perubahan," sebutnya.

Untuk kuota siswa yang diterima, ia menyebutkan saat ini ada tujuh kelas dengan jumlah satu kelas mencapai 32 siswa. "Kami hanya menerima sesuai dengan kelas

yang ada," imbuhnya.

Menurutnya, jadwal PPDB yang berbarengan dengan libur Idul Fitri juga menjadi pertimbangan dalam menetapkan waktu penerimaan.

"Mungkin saja pasca Lebaran penerimaan. Namun demikian pastinya masih kami tunggu dari disdik provinsi," ujar pria yang pernah menjabat Kepala Sekolah SMAN 4 Batam ini. (yui)